

Ringkasan Pembahasan Pedoman PPID

Pasal 8 (Informasi Ketenagakerjaan)

1. Masukan dari Pak Dir. LPU: Pertanyaan mengenai relevansi informasi ketenagakerjaan dalam pasal ini, mengingat di RRI istilah yang digunakan adalah "kepegawaian," bukan "ketenagakerjaan." Diharapkan ada koordinasi lebih lanjut dengan tim legal untuk memastikan kesesuaiannya.

Pasal 10 (Informasi yang Dikecualikan)

1. Fokus pada pembahasan terkait kategori informasi yang dikecualikan dari keterbukaan informasi publik.

Bab V (Standar Layanan Informasi Publik)

1. Bab ini membahas standar pelayanan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dan penyampaian informasi kepada publik.

Pasal 13 (Bantuan Kedinasan)

1. Pembahasan terkait mekanisme bantuan kedinasan dalam konteks pengelolaan informasi publik oleh PPID.

Bab VII Pasal 15 (Pelaporan dan Evaluasi)

1. Diskusi mengenai mekanisme pelaporan dan evaluasi kinerja pelayanan informasi publik oleh PPID.

Pasal 16 Ayat 1 (Laporan Semester Layanan Informasi Publik)

1. Pertanyaan dari peserta rapat mengenai maksud laporan semester. Penjelasan: laporan yang disusun oleh PPID pelaksana akan dikumpulkan dan disampaikan oleh PPID utama kepada atasan PPID (Dirut atau Dir. LPU). Peserta rapat telah memahami hal ini.

Pasal 17 (Monitoring dan Evaluasi)

1. Pembahasan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) yang diatur dalam pasal 17. Sistem monev masih perlu dibuat.
2. Masukan Pak Dir. LPU: Diusulkan agar pelaksanaan monev internal dilakukan mulai tahun 2025, dengan mengadopsi contoh dari BPOM dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.